



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SYAIFUL ANWAR**
2. Jabatan : **LURAH**
3. NHK : **229308**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.305.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 301.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F700RG TX AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. MOBIL, SUZUKI KARIMUN SL 410 R Tahun 2002, HADIAH Rp. 64.000.000
6. MOTOR, HONDA PCX 150 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
7. MOTOR, HONDA PHANTOM TA 200 CC Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 113.200.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.745.700.000
III. HUTANG	Rp.	251.115.149
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.494.584.851

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.